

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Kemiskinan dapat dicirikan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, tingkat pendapatan rendah, pendidikan dan keahlian rendah, keterkucilan sosial karena keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Secara singkat kemiskinan menurut Suparlan (1984) dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Saldanha (1998) persoalan kemiskinan mengandung enam masalah pokok, yaitu;

1. Masalah kemiskinan adalah kerentanan. Pembangunan infrastruktur ekonomi dan pertanian dapat saja meningkatkan pendapatan petani dalam jumlah besaryang memadai, akan tetapi kekeringan musim dua tahun berturut-turut akan dapat menurunkan tingkat hidupnya sampai titik yang terendah.
2. Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi di dalam masyarakat tidak memberi peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam poses produksi, atau mereka terperangkap dalam hubungan produksi yang eksploitatif yang menuntut kerja keras dalam jam kerja panjang dengan imbalan rendah. Hal ini disebabkan oleh posisi tawar menawar mereka dalam struktur hubungan produksi amat lemah. Kemiskinan dengan demikian juga berarti hubungan dependensi kepada pemilik tanah, pimpinan proyek, elit desa dan sebagainya.
3. Kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri; ketidakberdayaan menghadapi penyakit dan kematian, kekumuhan dan kekotoran.
4. Kemiskinan juga berarti menghabiskan semua atau sebagian terbesar penghasilannya untuk konsumsi gizi mereka amat rendah yang mengakibatkan produktivitas mereka rendah.
5. Kemiskinan juga ditandai oleh tingginya rasio ketergantungan, karena

besarnya keluarga dan beberapa diantaranya masih balita. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya konsumsi yang akan mengganggu tingkat kecerdasan mereka sehingga di dalam kompetisi merebut peluang dan sumber dalam masyarakat, anak-anak kaum miskin akan berada pada pihak yang lemah.

6. Kemiskinan juga terefleksikan dalam budaya kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Secara umum SMERU dalam Krisnamurti (2006) menyebutkan definisi kemiskinan yang memadai harus mencakup berbagai dimensi, antara lain :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan).
2. Tidak hanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak ada jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual dan massal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda, kelompok marjinal dan

terpencil).

2.1.2 Keluarga/Rumah Tangga Miskin

Istilah rumah tangga dan keluarga sering dicampur adukkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi, sedangkan keluarga lebih mengacu pada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. BPS (2000) membagi rumah tangga menjadi dua yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. (Kinanti, 2006).

Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah bahwa pembiayaan keperluan jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama.

Rumah tangga khusus adalah sekelompok orang yang tinggal di asrama atau tempat tinggal yang pengurusan sehari-harinya diatur oleh yayasan atau badan, misalnya asrama mahasiswa, lembaga pemasyarakatan, orang-orang yang berjumlah lebih dari 10 orang yang kos dengan makan, asrama ABRI dan lain sebagainya. Konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non makanan. Seseorang/rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini rumah tangga miskin yang dianalisis adalah penduduk bukan individu. Pertama, kemiskinan pada hakikatnya merupakan cermin keadaan rumah tangga. Kedua, apabila ditemukan data-data rumah tangga miskin maka intervensi terhadap rumah tangga akan lebih efektif dibanding intervensi kemiskinan terhadap individu yang cenderung mengarah pada pandangan bahwa orang miskin memiliki karakteristik sebagai penyebab kemiskinannya. Ketiga, data-data tentang rumah tangga miskin lebih mudah untuk dikembangkan daripada data-data individu miskin. (Faturachman, 1994).

Iver dan Page mendefinisikan keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), miskin adalah tidak berharta atau serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Menurut Koerniatmanto Soetoprawiryo menyebut dalam bahasa latin ada istilah *esse* (to be) atau (martabat manusia) dan *habere* (to have) atau (harta atau kepemilikan). Oleh sebagian besar orang persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks *habere*. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai atau memiliki sesuatu. Miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Swt. menggunakan istilah

itu dalam firman-Nya:

Menurut Sumodiningrat (1999), klasifikasi kemiskinan ada lima kelas, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan.

Menurut Sunarso dan Mardimin (1996), kemiskinan absolut adalah suatu keadaan apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum, memelihara fisik, sehingga tidak dapat bekerja penuh dan efisien. Kemiskinan jenis ini ditentukan oleh nutrisi yang dibutuhkan setiap orang. Nutrisi akan mempengaruhi jumlah kalori yang dibutuhkan terutama untuk dapat bekerja.

2. Kemiskinan Relatif

Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah dibanding kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Penekanan dalam kemiskinan relatif adalah adanya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin atau dikenal dengan istilah

ketimpangan distribusi pendapatan.

Kemiskinan relatif untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan berguna untuk mengukur ketimpangan pada suatu wilayah. Kemiskinan relatif juga dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan antar wilayah yang dilakukan pada suatu wilayah tertentu. Pengukuran relatif diukur berdasarkan tingkat pendapatan, ketimpangan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia berupa kualitas pendidikan, kesehatan serta perumahan.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Alfian, dkk (1980) mendefinisikan kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya. Kemiskinan struktural juga dapat diukur dari kurangnya perlindungan dari hukum dan pemerintah sebagai birokrasi atau peraturan resmi yang mencegah seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada.

4. Kemiskinan Kronis

Kemiskinan Kronis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif.

2. Keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian (daerah-daerah kritis sumberdaya alam dan daerah terpencil).
3. Rendahnya pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.

5. Kemiskinan Sementara

Kemiskinan sementara terjadi akibat adanya (i) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (ii) perubahan yang bersifat musiman dan (iii) bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

2.1.3 Ukuran-Ukuran Kemiskinan

Menurut Sajogyo (1977), cara mengukur kemiskinan dengan pendekatan kemiskinan absolut adalah dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi (kalori dan protein) dengan mengungkapkan masalah garis kemiskinan dan tingkat pendapatan petani. Ada tiga golongan orang miskin, yaitu golongan paling miskin yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 240 kg atau kurang, golongan miskin sekali yang memiliki pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 240-360 kg dan lapisan miskin yang memiliki pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg. Bank dunia (2000) menetapkan bahwa seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya dibawah US\$ 2 per hari.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga memberikan alternatif untuk mengukur

garis kemiskinan dengan cara menentukan berapa besar kalori minimum yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam sehari. Badan ini mengusulkan bahwa setiap orang harus memenuhi 2100 kalori setiap harinya. Jadi, 2100 kalori ini merupakan batas garis kemiskinan dengan memperhitungkan kebutuhan non pangan seperti kebutuhan perumahan, bahan bakar, penerangan air, sandang, jenis barang yang tahan lama serta jasa-jasa. Kemudian kriteria-kriteria ini diubah dalam angka rupiah. Garis kemiskinan yang ditetapkan BPS sendiri akan selalu mengalami penyesuaian, karena harga kebutuhan itu berubah-ubah.

Menurut Salim dalam Fithrajaya (2004), aktor kemiskinan atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu :

1. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal maupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha, sedangkan syarat tidak terpenuhi untuk memperoleh kredit perbankan seperti adanya jaminan kredit dan lain-lain, sehingga mereka yang perlu kredit terpaksa berpaling kepada "lintah darat" yang biasanya meminta syarat yang berat dan memungut bunga yang tinggi.
3. Tingkat pendidikan mereka yang rendah, tak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka tersita habis untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk belajar. Anak-anak mereka tidak bisa menyelesaikan sekolah, karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau menjaga

adikadik di rumah, sehingga secara turun temurun mereka terjat dalam keterbelakangan di bawah garis kemiskinan.

4. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Banyak di antara mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada maka kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar petani. Karena pertanian bekerja dengan musiman maka kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak diantara mereka yang lalu bekerja sebagai "pekerja bebas" (*self employed*), berusaha apa saja. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di desa maka banyak diantara mereka mencoba berusaha di kota.
5. Kebanyakan diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai ketrampilan (*skill*) atau pendidikan, sedangkan kota di banyak negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa ini. Apabila di negara negara pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka urbanisasi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga dalam perkembangan industri. Bahkan sebaliknya, perkembangan teknologi di kota-kota negara berkembang justru menapik pekerjaan lebih banyak tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota dalam kantong-kantong kemelaratan.

2.1.4 Teori Kemiskinan

Teori pembangunan yakin masalah kemiskinan akan teratasi dengan

sendirinya melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi. Bahkan Kuznets berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan merupakan syarat keharusan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi pada awal pertumbuhan ekonomi tingkat kesenjangan ekonomi makin tinggi sampai pada tingkatan tertentu baru menurun. Teori Harrod-Domar juga menyatakan demikian, dimana untuk pertumbuhan yang tinggi diperlukan akumulasi modal (*capital*) melalui tabungan (*saving*). Komponen masyarakat yang mampu menabung adalah kelompok orang kaya, bukan dari kelompok orang miskin. Sehingga pertumbuhan ekonomi hanya dapat dimotori oleh kelompok masyarakat yang mampu memupuk modal.

Menurut Nurkse dalam kutipan (Lincolin Arshad; 1999) ada dua lingkaran perangkat kemiskinan, yaitu dari segi penawaran (*supply*) di mana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari segi permintaan (*demand*), di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.

Kemiskinan dapat dicirikan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, tingkat pendapatan rendah, pendidikan dan keahlian rendah, keterkucilan sosial karena keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Secara singkat kemiskinan menurut Suparlan (1984) dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Saldanha (1998) persoalan kemiskinan mengandung enam masalah pokok, yaitu;

1. Masalah kemiskinan adalah kerentanan. Pembangunan infrastruktur ekonomi dan pertanian dapat saja meningkatkan pendapatan petani dalam jumlah besar yang memadai, akan tetapi kekeringan musim dua tahun berturut-turut akan dapat menurunkan tingkat hidupnya sampai titik yang terendah.
2. Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi di dalam masyarakat tidak memberi peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam poses produksi, atau mereka terperangkap dalam hubungan produksi yang eksploitatif yang menuntut kerja keras dalam jam kerja panjang dengan imbalan rendah. Hal ini disebabkan oleh posisi tawar menawar mereka dalam struktur hubungan produksi amat lemah. Kemiskinan dengan

demikian juga berarti hubungan dependensi kepada pemilik tanah, pimpinan proyek, elit desa dan sebagainya.

3. Kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri; ketidakberdayaan menghadapi penyakit dan kematian, kekumuhan dan kekotoran.

4. Kemiskinan juga berarti menghabiskan semua atau sebagian terbesar penghasilannya untuk konsumsi gizi mereka amat rendah yang mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

5. Kemiskinan juga ditandai oleh tingginya rasio ketergantungan, karena besarnya keluarga dan beberapa diantaranya masih balita. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya konsumsi yang akan mengganggu tingkat kecerdasan mereka sehingga di dalam kompetisi merebut peluang dan sumber dalam masyarakat, anak-anak kaum miskin akan berada pada pihak yang lemah.

6. Kemiskinan juga terefleksikan dalam budaya kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Secara umum SMERU dalam Krisnamurti (2006) menyebutkan definisi kemiskinan yang memadai harus mencakup berbagai dimensi, antara lain :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan).
2. Tidak hanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak ada jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan

keluarga).

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual dan massal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda, kelompok marginal dan terpencil).

2.1.5 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

2.1.5.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Sharp et al kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu : Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan dan kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Pembangunan manusia menjadi sasaran utama dalam pembangunan.

Manusia sebagai titik sentral pembangunan tidak lagi menjadi objek pembangunan namun menjadi subjek dalam pembangunan itu sendiri. Komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

1. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf rata-rata lamanya sekolah, parameter pendidikan dengan angka melek huruf dan lamanya sekolah, mengukur manusia yang cerdas, kreatif, terampil, dan bertaqwa.
2. Derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup (life expectancy rate), parameter kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, mengukur keadaan sehat dan berumur panjang.
3. Kesejahteraan yang diukur dari tingkat pendapatan masyarakat (Rumah Tangga). Hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari segi aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), maupun aspek kesejahteraan (ekonomi). Ada empat komponen utama dalam konsep pembangunan manusia, yaitu (BPS, 2002:3-4) :

1. Produktivitas (*productivity*)

Penduduk atau manusia harus berkemampuan untuk dapat meningkatkan produktivitasnya melalui berbagai kegiatan maupun usaha produktif serta dapat berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga kebutuhan pasar. Dengan

pemahaman seperti itu, pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan (*equity*)

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial. Semua hambatan terhadap setiap kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus hapuskan, sehingga setiap orang dapat mengambil manfaat dari setiap kesempatan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan (*sustainability*)

Akses terhadap kesempatan sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial harus tersedia tidak hanya untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya baik fisik, manusia, serta alam harus diusahakan untuk dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Hutang tersebut dapat berupa hutang kepada lingkungan (polusi dan eksploitasi sumber daya alam), hutang finansial (dalam negri maupun badan dunia), hutang sosial (tidak memperhatikan pembangunan manusia) dan hutang demografis (membiarkan pertumbuhan penduduk tidak terkendali).

4. Pemberdayann (*empowerment*)

Setiap orang harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukan semata-mata untuk semua orang. Konsep pemberdayaan dalam paradigma ini berarti bahwa setiap orang bebas menentukan dan memperluas

pilihan-pilihan hidup sesuai keinginannya (*enlarging the choice of people*).

Dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 4, Nomor 1,(2016), yang ditulis oleh Marius Masri, tentang “Pertumbuhan Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan Dan Perkembangan Belanja Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Kabupaten/Kota Di Provinsi NTT”, bahwa pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang mendasar, untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas, yang berada pada inti makna dari pembangunan. Terlebih lagi bagi kelompok masyarakat miskin yang umumnya tidak punya sumber daya kecuali modal tenaga maka kesehatan menjadi kebutuhan yang paling esensial. Tenaga kerja miskin yang tidak sehat tidak akan mampu bekerja maksimal sehingga produktivitas akan rendah dan pendapatan juga rendah. Demikian pula kondisi kesehatan yang buruk terutama pada ibu dan anak akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Anak-anak yang kurang sehat akan mengalami gangguan dalam proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan pun akan mengalami penurunan. Selanjutnya, tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik akan memperbesar pendapatan melalui peningkatan produktivitas, sehingga pendapatan masyarakat bertambah, karena kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan.

2.1.5.1.2 Pendidikan

Pengertian pendidikan menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 adalah segala sesuatu usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik didalam maupun diluar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila.

Menurut Notoatmodjo (2010) pendidikan adalah upaya persuasi atau pembelajaran kepada masyarakat, agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan (praktik) untuk memelihara (mengatasi masalah-masalah), dan meningkatkan kesehatannya. Perubahan atau tindakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang dihasilkan oleh pendidikan kesehatan ini didasarkan kepada pengetahuan dan kesadarannya melalui proses pembelajaran, sehingga perilaku tersebut diharapkan akan berlangsung lama (*long lasting*) dan menetap (langgeng), karena didasari oleh kesadaran. Dari beberapa definisi tentang pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya persuasif yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara menyeluruh dalam memasuki kehidupan dimasa yang akan datang.

Tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran (Ihsan,2005). Manusia memerlukan pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi, dan dapat mandiri melalui pendidikan. Produktivitas kerja memerlukan pengetahuan, ketrampilan dan penguasaan teknologi. Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan karyawan maka kinerja karyawan akan menjadi lebih baik dan tujuan dari perusahaan akan tercapai dengan sempurna (Uyoh, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepirtual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jalur pendidikan:

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. jenjang pendidikan formal:
 - a. Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
 - c. Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi,

institut, atau universitas.

2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.
3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluargadan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Secara definisi, seperti yang dilansir dalam *World Commision on Environmental and Development*, 1997 dalam McKeown (dalam Dian Satria, 2008), bahwa *sustainable development* adalah: “*Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*” Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat

tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Di sisi lain, dengan pendidikan, usaha pembangunan yang lebih hijau (*greener development*) dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan juga mudah tercapai.

Menurut Kartasasmita dalam Rahmawati (2006), taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

2.1.5.1.3 Kesehatan

Derajat kesehatan yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Kesehatan merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Kesehatan berguna untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan, dan jenis

pengobatan yang dilakukan.

Dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan.

Mils dan Gilson dalam Hakimudin (2010) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sector kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.
2. Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
3. Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.
4. Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.
5. Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi

keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

2.1.5.1.4 Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan manusia dari kebutuhan yang bersifat paling dasar seperti makan, minum, dan pakaian hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu hal mendasar yang mampu membuat manusia merasakan kesejahteraan.

Dalam teori ekonomi mikro ada yang dikenal dengan teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu pertama Pareto optimal. Dalam tingkatan Pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain.

Menurut UU nomor 6 1976 tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Menurut Taufik Berutu, (2017), kesejahteraan adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk

melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, di mana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

2.1.6 Hubungan Antar Variabel

2.1.6.1 Hubungan Antara Pendidikan dan Kemiskinan

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung

melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka. (Arsyad, 2016).

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Criswardani Suryawati, 2005). Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan

akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu, 2004).

Menurut Kuznets dalam Todaro (2011) pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Todaro menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan

2.1.6.2 Hubungan Antara Kesehatan dan Kemiskinan

Arsyad (2016) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Oleh karena, itu kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas.

Mils dan Gilson dalam Hakimudin (2010) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sector kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.
- 2) Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
- 3) Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan
- 4) Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.
- 5) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

Variabel-variabel yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan di suatu daerah umumnya terdiri dari:

1. Tingkat Kesakitan Penduduk. Tingkat keluhan penduduk terhadap kesehatannya, dimana semakin banyak jumlah keluhan ini maka semakin buruk kesehatan di daerah tersebut.
2. Sarana Kesehatan. Sarana kesehatan merupakan gambaran jumlah rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta beserta kapasitas tempat tidurnya. Selain itu juga menjelaskan jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan posyandu.
3. Angka Harapan Hidup. Penduduk yang hidup berumur panjang umumnya memiliki tingkat kesehatan yang baik. Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakatnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.
4. Tenaga Kesehatan. Tenaga kesehatan menggambarkan jumlah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bidan dan perawat. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

2.1.6.3 Hubungan Antara Kemiskinan Dan Kesejahteraan

Secara konseptual, kesejahteraan sosial memiliki berbagai makna yang relatif berbeda, meskipun demikian substansi di dalam pengertian-pengertian itu

pada dasarnya sama. Menurut Midgley (Adi, 2005), kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Pengertian ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari kegiatan pembangunan.

Menurut Nurkse dalam kutipan (Lincoln Arshad; 1999) ada dua lingkaran perangkat kemiskinan, yaitu dari segi penawaran (*supply*) di mana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari segi permintaan (*demand*), di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.

Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan manusia dari kebutuhan yang bersifat paling dasar seperti makan, minum, dan pakaian hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu hal mendasar yang

mampu membuat manusia merasakan kesejahteraan.

Dalam teori ekonomi mikro ada yang dikenal dengan teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu pertama Pareto optimal. Dalam tingkatan Pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain.

Menurut UU nomor 6 1976 tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang masalahnya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Alat Analisis dan Hasil Penelitian	Rumusan Masalah
1	A.Winda Noviyasari (2016)	Analisis factor faktor yang mempengaruhi keluarga Miskin di kelurahan samata kecamatan somba opu Kabupaten Gowa	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada.	Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah seberapa besar pengaruh kualitas angkatan kerja, kepemilikan modal, penguasaan teknologi, penggunaan sumber daya dan pertumbuhan penduduk terhadap keluarga miskin di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ?
2	Adit Agus Prastyo (2010)	Analisis faktor -faktor yang Mempengaruhi tingkat kemiskinan	Alat analisis yang digunakan penelitian ini adalah analisis panel data (<i>pooled data</i>) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 6. Analisis dengan menggunakan panel data adalah	Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan penelitian yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini

		kombinasi antara deret waktu (<i>time-series data</i>) dan kerat lintang (<i>cross-section data</i>). Berdasar hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Model regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 cukup layak digunakan karena telah memenuhi dan melewati uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. 2. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa besarnya nilai R^2 cukup tinggi yaitu 0,982677. Nilai ini berarti model yang dibentuk cukup baik dimana 98,27 persen variasi variabel dependen tingkat kemiskinan dapat dijelaskan dengan baik	adalah: 1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan? 2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan? 3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan? 4. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan? 5. Bagaimana perbedaan kondisi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
--	--	---	---

			oleh variabel-variabel independen yakni pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, tingkat pengangguran, <i>dummy benchmark</i> yakni Kota Semarang, dan <i>dummy</i> wilayah-wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan 1.73 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk menganalisis variabelvariabel lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.	
3	Miss Romuelah Seena (2016)	Analisis faktor -faktor yang mempengaruhi tingkat Kemiskinan di Thailand	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Thailand. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi panel data dengan metode <i>Fixed Effect Model</i> dengan bantuan <i>Software Eviews 8</i>. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Thailand, sedangkan variabel upah minimum	Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat

			dan pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Thailan	kemiskinan di Thailand? 2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Thailand? 3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Thailand?
4	Sinta Okpratiwi (2017)	analisis pendapatan dan tingkat kemiskinan rumahtangga petani kakao di kecamatan gedong tataan kabupaten pesawaran	Metode analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan usahatani, analisis pendapatan rumahtangga, analisis tingkat kemiskinan rumahtangga, dan analisis logistik tingkat kemiskinan rumahtangga petani. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pendapatan atas biaya tunai usahatani kakao sebesar Rp8.027.576,78 per ha per tahun dan pendapatan atas biaya total Rp Rp4.335.373,38 per ha per tahun. (2) Pendapatan rumahtangga	Berdasarkan latar belakang, maka dapat didefinisikan beberapa permasalahan penelitian yaitu, (1) berapa besarnya pendapatan usahatani kakao di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong

			petani kakao sebesar Rp21.277.833,33 per tahun. (3) Tingkat kemiskinan berdasarkan Indikator Bank Dunia petani yang tidak miskin dan petani miskin sebesar 52,94 persen dan 47,05 persen, sedangkan berdasarkan Indikator BPS (2016) tidak terdapat petani miskin pada kemiskinan makanan, sedangkan petani miskin pada kemiskinan bukan makanan dan petani tidak miskin sebesar 31,37 persen dan 68,63 persen.	Tataan Kabupaten Pesawaran (2) berapa besarnya pendapatan rumahtangga petani kakao di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (3) bagaimana tingkat kemiskinan petani kakao di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (4) faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan petani di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan
--	--	--	---	---

				Kabupaten Pesawaran.
5	Cica Zartika (2016)	Study Fakator-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Lohia	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna pada tahun 2015 maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Desa Lohia yaitu : - Besarnya beban tanggungan keluarga - Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan - Rendahnya tingkat pendapatan - Sarana produksi yang masih sederhana.	Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Kemiskinan dapat dicirikan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, tingkat pendapatan rendah, pendidikan dan keahlian rendah, keterkucilan sosial karena keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Secara singkat kemiskinan menurut Suparlan (1984) dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong

sebagai orang miskin.

Kemiskinan merupakan salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai permasalahan kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Semakin tinggi jumlah dan presentase penduduk miskin di suatu daerah akan menjadi tinggi beban pembangunan. Karena itu, pembangunan dikatakan berhasil apabila jumlah dan presentase penduduk miskin akan semakin sedikit.

Penyebab terjadinya kemiskinan dalam sebuah rumah tangga adalah rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) seperti pendidikan dan kesehatan, rendahnya pendapatan dan kualitas angkatan kerja (SDM) yang dimiliki oleh suatu daerah atau keluarga masih sangat minim, terbatasnya modal dan tenaga kerja sehingga tingkat produktivitas menjadi rendah, kurangnya seseorang yang mampu menguasai dan beradaptasi dengan teknologi maka akan menyebabkan pengangguran. Hal ini merupakan awal mula kemiskinan terjadi. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan pendapatan rendah dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis



